

KEGIATAN DPR-RI AWAL FEBRUARI 2012

Kegiatan DPR-RI awal bulan Februari 2012 ini diwarnai oleh berbagai kegiatan bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Kegiatan Konferensi PUIC ke-7 di Palembang, juga baru selesai pada 31 Januari 2012.

Berikut ringkasan beberapa kegiatan DPR-RI akhir Januari dan awal Februari 2012.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Pada Kamis, (26/01), Komisi VI DPR-RI melakukan Raker dengan Menteri keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, menteri Hukum dan Ham beserta jajarannya. Pada Rapat tersebut, Pemerintah (dalam hal ini Menkeu, Menkop dan UKM, dan Menhukham) telah menyerahkan DIM RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro kepada Komisi VI DPR-RI. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa pembahasan RUU ini mulai dibahas dalam Masa Persidangan III tahun sidang 2011-2012. Pada hari yang sama, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan secara komprehensif mengenai RUU tentang Koperasi, sebagai bahan untuk pembahasan DIM RUU. Komisi VI dan Menteri Koperasi dan UKM sepakat akan mengadakan lobi untuk membahas seluruh substansi pokok yang ada dalam RUU tentang Koperasi guna mempermudah pembahasan pada Panja DIM RUU tentang Koperasi.

Komisi IX telah mengadakan RDP dengan Sekjen Kemenkes, Sekjend Kemenakertrans, Dirjen Dikti, dan Kepala BNP2TKI, untuk menerima masukan tentang RUU tentang Keperawatan. Masukan-masukan dari hasil RDP ini akan menjadi referensi dalam penyusunan dan penyempurnaan draft RUU tentang Keperawatan.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Di Komisi I DPR-RI, pada Senin (30/01), RDP dengan Menhan, Menkeu, Men-PPN (Kep. Bapenas) dan Panglima



TNI, menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain, DPR mendesak Pemerintah agar memperbesar prosentase pinjaman dalam negeri sesuai arahan umum Presiden RI dalam rangka Pembangunan Millenium Essential Forces; mencari solusi penyelesaian terhadap kebutuhan anggaran yang belum terdukung sebesar USD 793.346.000 yang masih akan diupayakan; dan dalam hal penyusunan kontrak pembelian Alutsista TNI semaksimal mungkin memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. DPR juga meminta agar program sertifikasi tanah negara yang dipergunakan TNI dengan skala prioritas terhadap tanah-tanah yang tidak bermasalah, segera diselesaikan, dengan menetapkan anggaran pada Pos BPN-RI atau kemenhan RI.

Sementara pada Raker Komisi III dengan Kapolri pada Rabu (01/02), Komisi III mendesak Kapolri meningkatkan program *preventif dan pre-emptif* untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat, meningkatkan pencegahan dan penindakan peredaran narkoba dan Miras, serta mempercepat penuntasan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat seperti kasus Aceh, mesuji lampung dan sumsel, kasus Bima NTB, kasus Papua, kasus Sijunjung, kasus Kotawaringin Barat, serta kasus Sampang.

Komisi IV yang melakukan RDP dengan mitra kerjanya di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan pada Senin (30/01), antara lain meminta kepada Pemerintah agar menunda kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea pada tahun 2012, dan segera menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras.

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

Selain itu, Komisi IV DPR menerima usulan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.000.000.000,- terkait benih padi hybrida dengan demplot area seluas 200.000 ha sebanyak 800 unit. Keduanya sepakat untuk membahas anggaran hasil penghematan sebesar Rp. 121.000.000.000,- dengan eselin I terkait.

Di Komisi V, pada hari senin (30/01) melakukan RDP dengan Dirjen Perhubungan Udara, Dirut Utama PT. Garuda Indonesia (GIA), Dirut PT. Merpati Nusantara, Dirut PT Lion Mentari (LMA), Dirut PT. Indonesia Air Asia, Dirut PT. Metro Batavia, dan Dirut PT. Siwijaya Air. Rapat menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain; DPR meminta Ditjen perhubungan udara agar menyampaikan laporan performance maskapai penerbangan nasional secara periodik; mendesak Ditjend perhubungan udara dan maskapai penerbangan nasional agar senantiasa melakukan pengawasan melekat dan peningkatan frekwensi pengecekan kesehatan pada sumberdaya manusia penerbangan untuk menjamin keselamatan penerbangan. Sementara, pada hari Selasa (31/01), Komisi V juga melakukan raker dengan Menpera-RI. Dalam rapat ini DPR mendorong Kemenpera RI untuk meningkatkan jumlah MBR yang mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan perumahan setiap tahunnya; meminta pemerintah untuk memperhatikan dan memberikan kebijakan kepemilikan rumah bagi MBR pekerja sektor informal yang lemah dan akses perbankan; dan lain-lain.

Pada Rabu, (25/01), Komisi VII DPR melakukan RDP dengan Menristek dan Kepala LPNK Ristek serta Ketua Komite Inovasi Nasional. Dalam rapat ini, Komisi VII memberikan catatan kepada Pemerintah agar Kemenristek RI dan Kepala LPNK di lingkungan Kemenristek; melakukan optimalisasi *output dan outcome* kegiatan terhadap program-program pada pemangku kepentingan terkait sejalan dengan peningkatan program penyerapan anggaran pada pelaksanaan anggaran tahun 2012; membuat *action plan* triwulan pada APBN 2012 untuk disampaikan berkala kepada Komisi VII; memperbesar program kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam meningkatkan pengembangan ristek; dan lebih intensif mengkomunikasikan hasil penelitian pada masyarakat. Pada Senin, (30/01), Komisi VII juga melakukan RDP dengan menteri ESDM beserta jajarannya terkait dengan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 April 2012. Dalam rangka persiapan untuk melaksanakan amanat UU No. 22 tahun 2001, DPR meminta pemerintah; mempersiapkan roadmap percepatan pembangunan infrastruktur BBM Non-Subsidi serta kebijakan insentif terkait; rencana terpadu percepatan alokasi program konversi BBM ke BBG; rencana alokasi anggaran hasil penghematan subsidi BBM untuk percepatan pembangunan infrastruktur energi dan transportasi publik; dan program kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dalam rangka mengawal penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Sementara, pada Selasa (31/01), Komisi VII juga melakukan RDP dengan Dirut PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan menyimpulkan bahwa Komisi VII meminta PT. PGN untuk menyusun rancangan kegiatan penyediaan infrastruktur gas bumi dan upaya sinkronisasi roadmap dengan pemerintah terkait



program konversi BBM ke BBG; agar memberikan suply gas ke PLTG Belawan pada September 2013 untuk menggantikan BBM, sehingga PT. PLN dapat menghemat subsidi sebesar Rp. 3,5 tilyun per tahun serta untuk memenuhi kebutuhan Gas untuk industri di Provinsi Sumatera Utara. Komisi VII mendukung komitmen PT. PGN dan meminta untuk mempercepat pembangunan fasilitas dan infrastruktur gas bumi dalam bentuk Terminal penerimaan LNG terapung di Jabar, Lampung dan Medan.

Komisi VIII, berturut turut sejak Senin hingga Rabu (30/01-01/02), melakukan RDPR dengan mitra kerjanya. Dengan Dirjen rehabilitasi Sosial kemensos RI, Komisi VIII mendesak Dirjen rehabilitasi sosial agar dalam melaksanakan program dan anggaran tahun 2012 memperhatikan pandangan dan pendapat anggota tentang pelayanan korban (seperti korban NAPZA, HIV/AIDS, dan tuna sosial), peningkatan kualitas pelayanan dan ketersediaan sarana dan prasarana. Diharapkan, Dirjen Rehabilitasi Sosial menindaklanjuti segera UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui percepatan penyusunan rencana peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam RDP dengan panitia Seleksi Anggota KPHI, Komisi VIII meminta kepada panitia seleksi agar menyampaikan data-data lengkap dan profil para calon anggota KPHI serta penjelasan panitia sebagai bahan pertimbangan DPR. Dan pada RDP dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dihasilkan beberapa kesimpulan antara lain, Komisi VIII mendukung kesiapan BNPB mengingat prediksi tahun 2012 akan mengalami peningkatan intensitas bencana.

Sementara itu, Komisi IX DPR dalam RDP dengan mitranya pada hari Senin (30/01) dan Rabu (01/02), telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Pada Raker dengan kepala BNP2TKI DPR meminta kepada BNP2TKI agar: memberikan masukan yang sistematis kepada kemenakertrans RI mengenai perbaikan mekanisme pelaksanaan asuransi perlindungan TKILN, meningkatkan koordinasi dengan daerah terkait pengawasan pelaksanaan pelatihan berbasis masyarakat dan BLK; dan lain-lain. Pada RDP dengan Sekjen Kemenaker-

trans, Sekjend Kemenkes, Dirjen Dikti, dan Kepala BNP2TKI, disimpulkan bahwa Komisi IX DPR memberikan apresiasi atas berbagai masukan yang disampaikan oleh Pemerintah, dan materi-materi tersebut akan menjadi masukan dan referensi dalam penyusunan dan penyempurnaan draft RUU tentang Keperawatan. Sementara rapat Komisi IX dengan kepala Pengawas Obat dan Makanan antara lain disimpulkan bahwa DPR mendorong Badan POM untuk memperketat pengawasan obat dan makanan di titik-titik perbatasan dengan memperluas kerjasama dengan pihak terkait termasuk Kemenlu, kemendag, Kemenhukham, Kementerian Pertanian untuk karantina, kejaksaan, kepolisian, Dirjend Bea Cukai, dan masyarakat; memperketat pengawasan terhadap produk kosmetika dan perawatan kulit, baik yang beredar secara langsung di masyarakat maupun secara *online*; serta meningkatkan intensifikasi penyidikan pelanggaran di bidang obat dan makanan serta tindak lanjutnya dalam kerangka *criminal justice system* bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Komisi X DPR pada Senin, (30/01), telah melakukan Raker dengan Mendikbud RI. Rapat ini membahas antara lain masalah struktur organisasi baru di lingkungan Kemendikbud, ujian nasional, pelaksanaan BOS, dan dana alokasi khusus bidang pendidikan. Rapat ini menghasilkan banyak kesimpulan antara lain, dalam rangka ujian nasional (UN) menjadi parameter evaluasi pendidikan, DPR mendesak Pemerintah melakukan peningkatan perbaikan terus menerus terhadap kebijakan, formula persiapan, pelaksanaan dan pengawasan. DPR mendorong Pemerintah agar hasil UN dijadikan acuan dalam seleksi calon penerimaan peserta didik baru sesuai dengan jenjang pendidikan, khususnya jenjang pendidikan tinggi. DPR dan pemerintah akan melakukan pendalaman persiapan pelaksanaan UN tahun 2012 dalam bentuk lokakarya yang hasilnya untuk perbaikan UN 2013.

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Kegiatan bidang anggaran dalam minggu-minggu ini, Komisi-Komisi DPR tetap melakukan Raker dengan Pemerintah/pasangan kerja, dengan agenda Evaluasi Kinerja Kementerian tahun 2011, Realisasi Anggaran Kementerian TA 2011, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI Terhadap



Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kementerian TA 2011 dan Rencana Program Kerja Kementerian tahun 2012.

KONFERENSI PUIC KE-7 DI PALEMBANG

Konferensi PUIC ke-7 di Palembang yang berlangsung 24-31 Januari 2012, telah menghasilkan Final *Communique* terhadap berbagai isu dan telah mendapatkan persetujuan dari ketua dan anggota-anggota delegasi, yang meliputi: [1] *Palestinian Issue*, [2] *Iraq*, [3] *Lebanon*, [4] *Syria*, [5] *Sudan*, [6] *Somalia*, [7] *Peaceful Use of Nuclear Technology*, [8] *Making the Middle East Zone Free of Weapons of Mass Destruction*, [9] *Cyprus*, [10] *Jammu and Kashmir*, [11] *Azerbaijan*, [12] *solidarity with Turkey*, [13] *Terrorism*, [14] *Dynamics of People's in the Islamic World*, [15] *Economic Affairs*, [16] *Legal Affairs, Human Rights, and Environment*, [17] *Woman, Social, and Cultural Affairs*, [18] *Islamic Parliamentary Declaration*, [19] *Motion of Thanks*.

Disamping itu, Sidang PUIC telah menghasilkan Palembang Declaration sebagai berikut: [1] *Democracy*, yang terdiri dari 10 poin, [2] *Peace and Justice*, 8 poin, [3] *Solidarity and Prosperity Among Muslim*, 3 poin. Konferensi PUIC ini juga menghasilkan *Declaration of Muslim Women Parliamentarians of the PUIC*. Konferensi Muslim Women Parliamentarians baru pertama kali diadakan. Konferensi ini dibuka oleh presiden PUIC D. Marzuki Ali didampingi sekjen PUIC, serta memberikan sambutan. Dr. Nurhayati Ali Assegaf Msi. memimpin pertemuan ini dengan Rapporteur Ms. Susaningtyas N.H. Kertopati dari Indonesia dan vice president dari Arab Group dan African Group. Konferensi *Muslim Women Parliamentarians* mendiskusikan beberapa agenda, antara lain partisipasi wanita muslim, kesetaraan gender, pendidikan untuk anak-anak perempuan, perlindungan hukum kepada wanita Palestina dan pengurangan penderitaan terhadap anak-anak Palestina. Semua dokumen mengenai hal-hal tersebut ada di Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR-RI.

Dalam Pidato Penutupan Sidang PUIC (31/01), Ketua DPR/Presiden PUIC mengemukakan antara lain, sebanyak 38 parlemen OKI telah hadir, dan ini adalah jumlah terbesar yang pernah hadir dalam Konferensi Parlemen OKI. Dimata dunia parlemen internasional, PUIC diakui dan diperhitungkan perannya sebagai organisasi Parlemen Internasional yang dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian isu-isu utama internasional dan masalah global yang dihadapi. Dalam konteks ini, peranan dan kontribusi PUIC turut memberi warna bagi upaya penyelesaian isu-isu utama internasional. Presiden PUIC menghargai keberhasilan delegasi dalam merumuskan “Deklarasi Palembang” yang merupakan refleksi dari tekad dan kehendak untuk meneguhkan niat dalam memperkuat organisasi parlemen internasional. Dengan modal “Deklarasi Palembang” yang bernilai Islami, moral, dan kesetaraan, serta upaya memajukan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, ditegaskan, bahwa arah dan langkah PUIC kedepan adalah harapan bagi kemajuan dunia Islam dan masyarakat internasional.*

Indonesia Takkan Ambil Alih Sidang Pleno Ke-6 APA

Marzuki menyatakan, untuk tahun ini Indonesia tidak akan mengambil alih untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Pleno ke-6 APA karena Indonesia sudah tidak dapat lagi menyelenggarakan acara Internasional di Indonesia dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas.

“Kami tidak akan mengambil alih untuk menjadi tuan rumah karena anggaran kami sudah sangat terbatas untuk penyelenggaraan acara Internasional dan agenda kami pun di tahun 2012 ini sudah sangat padat sehingga sangat tidak dimungkinkan bagi kami untuk menyelenggarakan Sidang Pleno APA di negeri kami,” terangnya pada saat pertemuannya dengan Marzuki Alie di sela-sela sidang ke-14 General Committee, Konferensi PUIC, di Palembang, Sumsel, Minggu (29/1).

Asisten Sekretaris Jenderal APA, Mr. Bijan Moshirvajiri menyampaikan laporannya kepada Ketua DPR, Marzuki Alie yang didampingi oleh Atte Sugandi (F-PD) mengenai kronologis tertundanya Sidang Pleno ke-6 Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Sidang EXCON Tahun 2011. Menurut laporannya hal tersebut terjadi karena situasi politik yang terjadi di Suriah kurang memungkinkan.

“Sidang EXCON pertama telah dijadwalkan pada tanggal 9-10 November 2011, dan kemudian ditunda hingga tanggal 16-17 November 2011 itu pun



Ketua DPR RI dan juga Presiden PUIC Marzuki Alie (kanan)

belum dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi Negara penyelenggara tidak memungkinkan,” lapor Bijan.

Mengingat pada saat itu waktu penyelenggaraan Sidang Pleno APA yang sudah semakin mendesak, sehingga Ketua BKSAP, Hidayat Nur Wahid menyarankan agar penyelenggaraan Sidang tersebut dapat diambil alih oleh Negara Iran ataupun Rusia. Tetapi hingga waktu yang ditentukan untuk konfirmasi kehadiran para anggota delegasi dan hanya sedikit yang menyatakan bersedia untuk hadir, se-

hingga Sidang pleno belum dapat dilaksanakan hingga saat ini.

“Kami meminta masukan dari Bapak bagaimana jalan keluar atau solusi yang terbaik mengenai permasalahan yang terjadi dalam organisasi APA ini, agar Sidang Pleno dapat segera diselenggarakan” jelas Bijan.

Menanggapi hal tersebut, Marzuki mengatakan, untuk lebih lanjut kami akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Hidayat Nur Wahid mengenai solusi yang terbaik untuk penyelesaian permasalahan ini. (ra) foto:iw/parle

Meskipun di Warnai aksi Walk Out, PUIC Berjalan Lancar

Sekjen PUIC Mahmud Erol Kilic mengucapkan selamat atas sukses penyelenggaraan Konferensi Organisasi kerjasama negara islam /OKI (PUIC) yang dilaksanakan di Palembang.

“kami mengapresiasi positif penyelenggaraan PUIC yang berjalan dengan sukses dan lancar, dan kita sangat menikmati upaya-upaya yang dilakukan oleh panitia dalam menyukseskan acara ini,”ujarnya saat menyampaikan pidatonya dihadapan

peserta delegasi PUIC, di Palembang, Senin, (30/1).

Menurutnya, rapat-rapat yang dilakukan didalam konferensi baik reguler, maupun komite telah berjalan lancar. “Konferensi kita berlangsung ditengah situasi dan regional yang

berubah cepat. karena itu, Organ PUIC telah mendiskusikan berbagai tema krusial baik politik, budaya dimana kesimpulannya akan disampaikan untuk diadopsi dalam berbagai resolusi,”ujarnya

Menyinggung status palestina



Suasana aksi walk out oleh beberapa peserta delegasi pada Sidang PUIIC-7 di Palembang

dalam berbagai konferensi sebelumnya, jelas Erol, isu tersebut mengalami kemajuan yang signifikan dan prinsipnya PUIIC mendukung Palestina sebagai negara yang berdaulat dan keikutsertaannya didalam PBB setelah sebelumnya negara Palestina diterima di badan PBB Unesco. “Kita harus berada bersama dalam menghadapi Is-

rael, menghentikan perluasan yahudi, penghentian blokade di jalur Gaza. selain itu kita menginginkan terciptanya zona bebas senjata pemusnah massal,”katanya. Karena itu, PBB harus memaksa Israel untuk mematuhi resolusi PBB terkait senjata nuklir.

Dia menambahkan, Kita menekankan hak semua negara untuk mengem-

bangkan energi nuklir untuk damai, serta memerangi terorisme baik yang dilakukan oleh negara maupun sektarian muslim muslim. “Kita mendukung upaya yang dilakukan berbagai negara dalam memerangi diskriminasi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. karena itu perlu dialog yang mendalam antara Islam dan non Islam,”katanya.

Erol meminta keterlibatan seluruh parlemen agar mendesak pemerintahnya mendorong PBB agar memberikan penghargaan dan dorongan penuh terhadap kebebasan beragama dan tidak mendukung negara yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi menyerang agama lain. “Peran perempuan dan kesetaraan dalam pembangunan masyarakat akan terus didorong dan dimaksimalkan. Sementara isu perempuan dan keluarga menjadi isu sentral dalam berbagai pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan,”terangnya. (tim parle)

foto:iw/parle

BK Minta Barang Impor di Ruang Banggar Diganti Produk Dalam Negeri

Pemeriksaan yang dilakukan Badan Kehormatan – BK DPR RI terhadap beberapa pihak yang terkait proyek renovasi ruang rapat Banggar sudah mulai menemukan beberapa titik terang.

Dari keterangan yang diperoleh dari pihak konsultan pelaksana, anggaran renovasi senilai Rp.20.3 miliar seharusnya bisa dihemat sampai Rp.7 miliar lebih apabila barang impor yang digunakan diganti produk dalam negeri.

“BK sudah sepakat meminta Sekjen untuk mengganti komponen impor dengan barang produk dalam negeri yang juga berkualitas bagus,” kata Wakil Ketua BK DPR RI, Siswono Yudo Husodo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/12).

Politisi dari Partai Golkar ini menyebut barang impor yang patut diganti diantaranya kursi dari Jerman sebanyak 178 unit senilai Rp.4 miliar, monitor layar lebar dari Korea Rp.1,8 miliar. Selanjutnya karpet dari Amerika

Rp.980 juta serta perangkat penerangan dari Belanda senilai Rp.1,9 miliar.

“Sekjen kita minta membicarakan dengan supplier-nya bagaimana mekanisme penggantian yang terbaik,” lanjutnya. Sebelumnya Badan Kehormatan sudah meminta keterangan dari pelaksana proyek yaitu konsultan perencana PT Gubah Laras, konsultan pengawas PT Jagad Semesta dan pelaksana proyek PT Pembangunan Perumahan.

Sementara itu anggota BK DPR RI Ali Maschan Moesa menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan sudah lengkap memanggil pihak-pihak terkait yaitu pimpinan BURT, Banggar, Sekjen dan perusahaan pelaksana proyek. Sejauh ini belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.

“Apa yang dilakukan BK ini dalam rangka menjaga marwah DPR yang hari-hari ini kita rasakan kondisinya sudah mencapai titik nadir. Kita terus upayakan ada perbaikan dari dalam. Semua pihak hendaknya melakukan introspeksi-lah, tidak saja anggota DPR termasuk juga supporting kita dari kesekjenan,” imbuhnya.

Ia menambahkan saat ini BK masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Apabila ditemukan ada penyimpangan penggunaan anggaran, pelanggaran tata tertib yang dilakukan anggota DPR, maka BK dipastikan akan menindaklanjutinya. “Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, kita akan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum,” tandas guru besar dari IAIN Sunan Ampel Surabaya ini. (iky)

Presiden PUIC Beri Beberapa Gagasan

Dalam Konferensi PUIC Ke-7 yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden PUIC Marzuki Alie menyampaikan beberapa gagasan yang dapat dijadikan landasan untuk memperkuat PUIC dalam melakukan peranannya.



Presiden PUIC RI Marzuki Alie menyampaikan gagasannya saat pembukaan Konferensi PUIC di Palembang

Gagasan tersebut disampaikan saat Pembukaan Konferensi ke-7 PUIC, Senin (30/1) di Hotel Arvaduta, Palembang.

Gagasan pertama yang disampaikan Marzuki adalah mendorong seluruh Parlemen Negara Anggota OKI agar aktif dan lebih konstruktif dan memiliki komitmen dalam upaya membesarkan PUIC kedepan sehingga statusnya sebagai organisasi parlemen internasional semakin diakui dan diperhitungkan.

Selain itu, mengupayakan realisasi perubahan Statuta PUIC sebagai organisasi yang lebih terbuka yang mengharuskan agar negara-negara yang memiliki komunitas Muslim sekalipun merupakan minoritas di negaranya, agar parlemen negara tersebut dapat menjadi Observer/Pengamat dalam Organisasi PUIC.

Kedepan, kata Marzuki, PUIC perlu memperluas fokusnya pada isu-isu global dengan pertimbangan bahwa keanggotaan PUIC bersifat antar kawasan serta fakta bahwa komunitas Muslim telah menyebar ke Eropa, Australia, bahkan ke Amerika Serikat. Dengan demikian PUIC perlu memperluas perhatiannya untuk mencakup seluruh

hal tersebut dengan segala dinamika dan problematikanya, tentu saja dengan tetap menjadikan Palestina sebagai masalah yang harus diperjuang-

meningkatkan kemampuannya untuk menindak-lanjuti berbagai resolusi PUIC agar dilaksanakan oleh anggota PUIC.

Marzuki mengatakan, keseluruhan hasil Konferensi PUIC Ke-7 ini akan dituangkan dan direfleksikan dalam suatu Deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Palembang.

Dia berharap, Konferensi yang berlangsung di Palembang ini dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan hal-hal konkrit yang dapat diimplementasikan untuk kebaikan dan kesejahteraan negara anggota PUIC dan masyarakat internasional.

Menurut Marzuki, penyelenggaraan Konferensi Internasional PUIC ini akan memiliki arti dan makna apabila dapat mengukir sejarah dengan menghasilkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan dasar dan tujuan didirikannya Organisasi PUIC dan dapat dirasakan



Presiden PUIC RI Marzuki Alie menyampaikan gagasannya saat pembukaan Konferensi PUIC di Palembang

kan bersama.

Pemikiran lain yang disampaikan adalah mendorong penguatan Sekretariat PUIC menjadi supporting system yang handal dalam mendukung kegiatan dan kinerja PUIC kedepan serta

manfaatnya bagi negara anggota PUIC khususnya, dan bagi kelanjutan kehidupan demokrasi dan berparlemen yang berkualitas, kemakmuran, perdamaian, dan keamanan internasional pada umumnya. (tt) foto:ig/parle

PUIC Ke-7 Jadikan Momentum Organisasi Lebih Kuat Dan Efektif

Ketua DPR RI Marzuki Alie, selaku Presiden PUIC berharap Konperensi PUIC ke-7 dapat dijadikan momentum membuat sejarah PUIC lebih kuat dan efektif serta bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.

Demikian sambutan Marzuki Alie di depan Anggota Delegasi PUIC pada saat pembukaan Konferensi ke-7 PUIC yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (30/1) di Ballroom, Hotel Aryaduta, Palembang.

Marzuki mengatakan, Konperensi PUIC ke-7 ini semestinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja parlemen negara anggota PUIC kedepan dalam rangka memperjuangkan kepentingan bersama negara anggota PUIC. Terutama untuk meraih kemajuan, kemakmuran dan perdamaian, juga dalam praktek berdemokrasi.

Forum ini, kata Marzuki, juga dapat dipakai untuk meningkatkan institutional building dan untuk membangun lembaga legislatif yang kuat sehingga dapat lebih efektif dalam melaksanakan amanat rakyat.

Dalam konferensi kali ini, Marzuki menggarisbawahi hal-hal yang berkaitan dengan peranan dan tugas lanjut PUIC sebagai Organisasi Parlemen Internasional, termasuk peran serta dalam memberikan solusi terhadap isu-isu utama internasional yang men-

jadi perhatian dan merupakan kepentingan bersama.

Menurut Marzuki, anggota PUIC masih perlu meningkatkan kerjasama dan memberikan dukungan bagi pengakuan Palestina sebagai anggota penuh di PBB dan badan-badan internasional, mengakhiri isolasi terhadap Gaza dan penolakan terhadap kejahatan Israel atas anggota Parlemen Palestina dimana Israel malah menangkap kembali Ketua Parlemen Palestina Aziz Dweik.

Sebagai sesama anggota parlemen, melalui organisasi parlemen PUIC, sudah seharusnya memberikan dukungan penuh untuk pembebasan pimpinan dan anggota parlemen Palestina dari penjara Israel dan menuntut keras kejahatan Israel terhadap pimpinan dan anggota parlemen Palestina tersebut.

Marzuki mengatakan, dalam upaya kontribusi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, masih menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya potensi konflik di berbagai belahan dunia yang setiap saat dapat mengganggu perdamaian dan

keamanan internasional.

Di bidang ekonomi, memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam mengurangi kemiskinan dan melakukan upaya bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu juga melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya dampak negatif akibat terjadinya krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia Barat.

Marzuki juga menyoroti, perkembangan arena politik internasional yang telah berubah dengan cepat dan dinamis. Perkembangan dan demokratisasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta masalah tumpang tindih klaim di Laut China Selatan yang melibatkan berbagai kepentingan negara besar dapat berdampak kepada stabilitas keamanan dan perdamaian di tingkat regional dan global.

Perkembangan situasi dan kondisi internasional tersebut, katanya, merupakan tantangan baru bagi negara anggota PUIC yang harus diselesaikan dan disikapi bersama dengan berdasarkan kepentingan bersama.

Sesuai dengan tujuan dan cita-cita dibentuknya PUIC, maka semua negara anggota PUIC memiliki komitmen untuk melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam Statuta PUIC.

Oleh karena itu, kegiatan, program, dan perhatian PUIC harus lebih fokus kepada realitas masalah yang dihadapi. "Kita harus mencari solusi terbaik yang dapat kita capai bersama, sehingga keberadaan parlemen kita benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan umat Islam," katanya.

Dengan demikian, kata Marzuki, mereka tidak perlu memilih terorisme sebagai alternatif, sebab melalui demokrasi merekapun bisa memperjuangkan dan merealisasikan cita-cita mereka. (tt)



Presiden PUIC Marzuki Alie (tengah)

Republik Maldives Menjadi Anggota PUIC ke-52

Sesi ke-14 Komite Umum (Dewan) Organisasi Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam atau 14th Session of The PUIC General Committee (Council) menyepakati seluruh agenda Sesi ke-7 Konferensi PUIC di Palembang Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan 30-31 Januari 2012.

Sidang juga menyetujui permohonan Majelis Rakyat Republik Maldives untuk menjadi anggota tetap PUIC, permohonan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), parlemen Bellarus dan Rusia, serta Economic and Social Research and Training Center for Islamic Countries (ESRTCIC - Subsidiary Body of the OIC) sebagai observer.

Sidang dipimpin langsung Ketua DPR RI, Marzuki Alie selaku presiden PUIC didampingi Sekretaris Jenderal PUIC, Prof. Dr. Mahmud Erol KILIC. Marzuki Alie mengatakan, semua permohonan keanggotaan maupun status pemantau akan diadopsi pada Sesi ke-7 Konferensi PUIC di Palembang 30-31 Januari 2012 mendatang. Dalam laporannya Sekjen PUIC, Prof. Mahmud Erol memaparkan, permohonan keanggotaan Majelis Rakyat Maldives telah dibahas pada pertemuan Komite Eksekutif (Excom) PUIC sebelumnya. "Dengan masuknya Maldives anggota PUIC akan menjadi 52," ucapnya. Prof. Mahmud Erol menambahkan, sidang Excom ke 26 di Ankara Turki juga telah menyepakati Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), parlemen Bellarus dan Rusia, serta ESRTCIC menjadi observer.

Sidang General Committee ke-14 juga membahas persoalan keuangan organisasi PUIC. Sekjen PUIC memaparkan ada sejumlah negara anggota PUIC yang menunggak iuran sampai 3 tahun. Prof. Mahmud menjelaskan ada beberapa negara yang memberi alasan yang jelas mengapa tidak bisa membayar iuran, tetapi ada yang tidak memberi alasan sama sekali. "Hal ini perlu dicarikan jalan keluarnya," tukasnya. Ketua Komite Keuangan PUIC, Sayed Habib Hasyim Maliki mengungkapkan, anggaran keseluruhan PUIC dalam satu tahun sebesar 1,7 juta dolar Amerika yang berasal dari iuran anggota. Padahal menurut statuta, anggaran PUIC seharusnya 50% dari



Para delegasi dan observer berdiskusi disela-sela Sidang PUIC Ke-7 di Palembang

anggaran Organisasi Konferensi Islam (OIC). "Faktanya PUIC hanya berjalan dengan 7% anggaran OIC. Dengan anggaran ini kita hanya bisa menjalankan keperluan dasar organisasi," jelas Sekjen PUIC. "Anggaran ini bahkan lebih kecil dari organisasi di bawah OIC seperti Islamic Shipment yang sebesar 4 juta dollar," tambahnya.

Pada agenda pembahasan usulan Indonesia mengenai perluasan dan penguatan keanggotaan PUIC, sejumlah negara menyampaikan pendapat yang berbeda. Ketua delegasi Indonesia yang juga Ketua BKSAP DPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, Indonesia telah melakukan pendekatan ke sejumlah negara dengan penduduk muslim yang besar tetapi belum menjadi anggota PUIC, seperti Maladewa dan Bosnia Herzegovina. "Negara dengan penduduk muslim minoritas juga bisa diusulkan menjadi observer," ucap Hidayat. Delegasi Uganda, Palestina, dan Maroko mengapresiasi upaya Indonesia melakukan pendekatan ke beberapa negara tersebut. Terhadap usulan mengenai negara dengan penduduk muslim minoritas, Sekjen PUIC Prof. Mahmud Erol mengatakan hal ini perlu dicermati mengingat ada be-

berapa negara barat yang penduduk muslimnya cukup banyak, di antaranya Amerika, Rusia, Perancis, bahkan di Israel pun banyak penduduk yang muslim.

Delegasi Palestina dan sejumlah negara Arab lainnya dengan tegas menolak jika Israel diusulkan menjadi observer. Menengahi perdebatan mengenai hal ini presiden PUIC Marzuki Alie mengatakan, tidak ada keinginan seluruh anggota PUIC untuk memasukkan Israel ke dalam PUIC baik sebagai anggota maupun observer karena hal itu bertentangan dengan statuta. "Usulan dari Indonesia kita setuju dengan sejumlah catatan," ucapnya yang disepakati seluruh delegasi.

Kepada wartawan usai sidang, Hidayat Nur Wahid menjelaskan alasan Indonesia mengusulkan negara dengan penduduk minoritas muslim adalah untuk membantu mereka jika mempunyai persoalan dengan negaranya. "Sejak awal kita tidak menginginkan Israel masuk dalam PUIC. Tadi Sekjen PUIC agak terpelesat lidah. Kita hanya ingin agar suara warga muslim minoritas dapat didengar dalam forum PUIC," jelasnya. (Rn.Tvp) foto : Ry/Parle

Presiden Resmikan Al Quran Al Akbar

Usai membuka Konferensi ke-7 PUIC, Senin (30/1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Al Quran Al Akbar di Palembang yang dinilai sebagai ukiran Al Quran terbesar di dunia.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Al Quran Al Akbar di Palembang

“Saya gembira bisa berada di tengah anda semua dan terhormat mendapat kesempatan meresmikan Al Quran Al Akbar, karya ini simbol dari kemegahan Islam dan artistik work ini dibuat oleh orang Indonesia,” kata Presiden saat meresmikan Al Quran tersebut dalam rangkaian jamuan makan malam bersama delegasi konferensi parlemen negara-negara anggota organisasi negara Islam.

Presiden mengatakan, karya besar ukiran Al Quran tersebut merupakan usaha bersama untuk bisa meneladani Al Quran dan melestarikan motif lokal.

Ketua DPR RI yang juga Presiden PUIC Marzuki Ali mengatakan, Al Quran Akbar yang dibuat di Palembang sejak 2002 hingga 2008 terbuat dari ukiran kayu Tembesu.

“Di buat dari kayu Tembesu dalam ukuran besar, Al quran akbar dibuat 2002 dan selesai 2008, setelah selesai ditempatkan di Masjid Agung Palembang untuk sosialisai dan masukan masyarakat selama dua tahun, proses pembuatan, penyelesaian dan pengukirannya diawasi oleh ahli yang berkompetensi,” kata Marzuki Ali.

Tujuan dari pembuatan Al Quran

akbar tersebut, kata Marzuki antara lain memelihara kemurnian Al Quran, memelihara mushaf, mencintai Al Quran dan mengembangkan nilai-nilai mulia Al Quran bagi masyarakat.

Al Quran Al Akbar terbuat dari kayu Tembesu dengan ukuran keseluruhan 9 meter persegi, ukuran per halaman 177cm x 144 cm x 2,5 cm. Sejumlah 30 juz dituangkan dalam 630 halaman atau 315 lembar kayu.

Kayu tembesu yang digunakan 40 meter kubik, dikerjakan 20 orang pengukir, ukiran khas Palembang berwarna kuning emas.

Biaya yang dihabiskan lebih dari Rp1 miliar, nantinya akan ditempatkan di Museum Mushaf Ali Akbar. Saat ini mushaf Al Quran itu masih berada di Pesantren Modern Al Ihsaniyah di Kecamatan Gandus Palembang.

Sebelum Presiden meresmikan Al Quran Al Akbar ini, Anggota Delegasi Parlemen PUIC telah mengunjungi Pesantren Al Ihsaniyah untuk melihat Al Quran terbesar tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Perwakilan delegasi dari Nigeria, Sade Umar Abu bakar mengatakan, karya seni ini sangat menarik dan dapat dijadikan sejarah dalam Islam karena merupakan yang pertama dan mungkin satu-satunya yang ada di dunia. “Saya sangat terkesan dengan ide yang muncul untuk dapat membuat karya seni yang sangat indah ini, Al-qur’an yang di buat dalam ukiran kayu yang benar-benar menakjubkan dan saya sangat salut,”terangnya.

Sependapat dengan Sade Umar, menurut Perwakilan dari Uganda, Balye Jjusa Sulaeman karya seni tersebut perlu diberikan apresiasi dan penghargaan dan juga sebuah hal yang patut disyukuri, karena tulisan-tulisan Al-qur’an yang sangat indah dapat dituangkan kedalam karya seni yang indah pula dan belum pernah ada di dunia. (tt) foto:ry/parle

Priyo Dukung Kemerdekaan Palestina

Priyo Budi Santoso, Ketua Delegasi DPR RI menyampaikan solusi yang terkait mengenai konflik Israel-Palestina, Priyo menyatakan, Delegasi Indonesia mengecam tindakan Israel menduduki tanah Palestina yang telah menyebabkan bencana kemanusiaan, kehancuran ekonomi dan degradasi sosial yang tidak hanya mengecam proses perdamaian kawasan, tetapi juga membahayakan keamanan internasional.

“Langkah awal yang kami usulkan adalah menjadikan keanggotaan penuh Palestina di UNESCO sebagai momentum positif untuk mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Dukungan kolektif seperti ini akan memperkuat proses untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan negara Palestina yang merdeka,” tegas Priyo dalam pidatonya pada konferensi PUIC ke 7 Palembang, Sumsel, Senin (30/1).

Priyo menambahkan, dukungan Indonesia terhadap kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan wilayah dan persatuan nasional termasuk di Timur Tengah maupun Afrika Utara. “Perkembangan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan wujud meningkatnya ekspektasi dan partisipasi masyarakat untuk membangun sebuah pemerintahan demokratis melalui transisi damai,” jelasnya.

Delegasi Indonesia meminta seluruh Anggota Parlemen PUIC untuk mendukung transisi politik di dunia Islam yang berlangsung inklusif, tertib dan damai sehingga memenuhi aspira-

si rakyat melalui proses politik yang transparan dan kredibel.

Masalah terorisme juga tidak luput dari perhatian Delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia percaya bahwa terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan untuk tujuan apapun merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

“Kami mendorong Anggota Parlemen PUIC untuk mengambil langkah-langkah preventive untuk menangani akar penyebab terorisme, termasuk diantaranya penyelesaian konflik berkepanjangan serta pendudukan asing,” jelasnya.

Priyo meyakini, solusi untuk menyelesaikan akar penyebab terorisme dapat diselesaikan dengan perkembangan demokrasi, mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan penghormatan hak asasi manusia serta supremasi hukum untuk mencapai kesejahteraan rakyat berdasarkan kehidupan yang berkeadilan dan harmonis.

Selain itu, dalam pidatonya Priyo

membahas pula mengenai maraknya diskriminasi dan pelanggaran hak-hak pekerja migran, khususnya perempuan pekerja migran, dan anggota keluarga mereka.

“Delegasi Indonesia mendukung Pelaksanaan Rencana Aksi OKI untuk Kemajuan Perempuan serta mendesak Anggota Parlemen PUIC untuk bekerjasama dengan pemerintah mereka dalam menyediakan akses hukum dan peradilan serta sumber daya dan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi pekerja migran yang haknya telah dilanggar, termasuk perlakuan diskriminatif dan permasalahan tidak dibayarnya ataupun rendahnya gaji yang mereka terima,” katanya.

Dalam akhir pidatonya Priyo mengatakan, PUIC akan berkontribusi kepada perkembangan kondisi Ummah dan masyarakat global di masa-masa yang penuh tantangan. “Saya percaya bahwa Konferensi PUIC yang ke-7 ini akan menjadi kesempatan untuk menguatkan momentum konsolidasi yang dapat menghasilkan solusi kongkrit bagi permasalahan-permasalahan Ummah,” pungkasnya. (ra) foto:parle



Delegasi Indonesia pada Sidang PUIC Ke-7 di Palembang, Hidayat Nur Wahid (kiri), Priyo Budi Santoso (tengah) dan Nurhayati Ali Assegaf (kanan)

Ketua DPR RI Membuka Konferensi Pertama Parlemen Muslim Perempuan

Ketua DPR RI Marzuki Alie yang juga Presiden Organisasi Parlemen Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (PUIC) membuka Konferensi Pertama Anggota Parlemen Muslim Perempuan (The 1st Conference on The Muslim Women Parliamentarians) yang berlangsung di Hotel Aryaduta Convention Center, Palembang, Sumatera Selatan, Jum'at (27/1).

Mendampingi Ketua DPR, Sekretaris Jenderal PUIC, Prof. Dr. Mahmud Erol KILIC, dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI yang juga president of Inter-Parliamentary Union (IPU) of Coordinating Committee of Women Parliamentarians, Dr. Nurhayati Ali Assegaf.

Dalam pidatonya Ketua DPR mengatakan, merupakan suatu kehormatan bagi Palembang khususnya dan Indonesia umumnya menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan The Conference on The Muslim Women Parliamentarians yang pertama ini. Marzuki mengharapkan konferensi ini dapat menghasilkan sesuatu yang positif bagi peningkatan peran serta perempuan muslim dalam politik, sosial, dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Ketua DPR mengungkapkan, sejak tahun 2004 Indonesia telah memasukkan persyaratan 30% partisipasi perempuan dalam parlemen bagi setiap partai yang ikut dalam pemilu. "Dengan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam parlemen, keterwakilan dan suara perempuan dari perspektif perempuan akan sema-

kin meningkat, sehingga perempuan dapat berperan lebih besar bagi rakyat dan negaranya," ujarnya menjelaskan. Kepada para peserta konferensi Marzuki mengingatkan, akan target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 yang harus diperhatikan bersama.

Sekretaris Jenderal PUIC, Prof. Dr. Mahmud Erol KILIC dalam laporannya mengatakan, Pada pertemuan PUIC di Kampala Uganda Januari 2010, PUIC sudah mengadopsi resolusi tentang peran perempuan. juga dalam pertemuan World Islamic Forum Parliamentarians I, di Syria April 2011 lalu. Prof. Mahmud menambahkan, pertemuan ini adalah upaya berkelanjutan yang dilakukan Sekretariat Jenderal PUIC yang bertujuan untuk memperkuat peran perempuan, dan melakukan koordinasi dengan anggota parlemen sebagai implementasi resolusi pada Sesi ke 13 Dewan PUIC atau 13th Session of the PUIC Council (General Committee), yang berlangsung di Abu Dhabi pada 18 Januari 2011. Pertemuan ini juga merupakan hasil pertemuan Sekjen PUIC dengan presiden PUIC, yang mulia Bp. Marzuki Alie di Jakarta.

"Beliau setuju Indonesia menjadi tuan rumah konferensi ini bersamaan dengan sidang PUIC di Palembang," jelasnya.

Anggota delegasi Indonesia, Hj. Okky Asokawati (F-PPP) mengatakan, saat ini masih banyak anggapan atau stereotif mengenai perempuan yang negatif, seperti tidak rasional, lemah, cengeng, dan mudah digoda. Padahal perempuan memiliki peran ganda dalam rumah tangga. "Perempuan terbebani pada persoalan reproduksi dan pekerjaan domestik rumah tangga," jelasnya. Okky mengungkapkan, saat ini perempuan masih termarginalkan. Pekerjaannya pun sub ordinat, seperti pembantu rumah tangga dan buruh pabrik yang digaji rendah. Untuk itu dirinya berharap pertemuan ini dapat menghasilkan gagasan dan keputusan konkret tentang penguatan peran perempuan di masyarakat.

"Saya berharap pertemuan ini dapat mendorong perempuan-perempuan menjadi pemimpin di berbagai bidang," ucapnya. Okky juga berharap parlemen di negara-negara anggota PUIC dapat menghasilkan regulasi yang dapat memberikan hak dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki.

Anggota delegasi Aljazair, Hon. Mrs. Fitti Naceria pada kesempatan itu mengatakan, dirinya menyepakati item-item yang mendukung peran perempuan dalam politik dan sosial, serta pemenuhan hak-hak perempuan. Terkait persoalan yang dialami rakyat Palestina, kepada peserta konferensi Mrs. Fitti mengatakan, anggota parlemen perlu mengajak pemerintah di negaranya untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. "Masih banyak wanita dan anak-anak Palestina yang mengalami penindasan dan ketidakadilan akibat pendudukan zionis Israel," ungkapnya. (Rn.Tvp) Foto:Ry/Parle



Anggota Delegasi Indonesia untuk Parlemen Muslim Perempuan Hj. Okky Asokawati (F-PPP)

Komisi VII Usulkan Pengurangan Subsidi

Komisi VII DPR RI dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran membahas Rencana Pengaturan Pembatasan BBM bersubsidi Tahun 2012, mengusulkan alternative kebijakan dengan melakukan pengurangan besaran subsidi pada penjualan premium per liter nya.



Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon (kiri) saat Rapat Kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik

Dalam Rapat Kerja Komisi yang membidangi Energi yang dipimpin Ketua Teuku Riefky Harsya, dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (30/1).

Setelah mendengar paparan dan penjelasan Menteri ESDM Jero Wacik, Menanggapi rencana Pemerintah melakukan Pembatasan Pengaturan BBM bersubsidi yang akan dimulai tanggal 1 April 2012. Komisi VII bersikap bahwa perpindahan pengguna premium ke pertamax pada kendaraan roda empat pribadi dianggap ter-

lalu mahal dan tidak memenuhi rasa keadilan. Pelaksanaan konveksi BBM ke BBG dianggap mempunyai tingkat kompleksitas kesulitan yang cukup tinggi.

Komisi VII juga mengusulkan untuk melakukan perubahan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 dan adanya pengajuan judicial review undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka persiapan untuk melaksanakan amanat UU No.22 Tahun 2011, Komisi VII meminta Pemerintah untuk mempersiapkan road map percepatan pembangunan infrastruk-

tur BBM Non-Subsidi seperti kilang, tangki timbun terminal, mobil tangki dan SPBU. Serta kebijakan insentif terkait.

Pemerintah diminta mempersiapkan rencana terpadu percepatan program konversi BBM ke BBG, meliputi penyiapan alikasi gas, pipanisasi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan converter kit. Serta menyampaikan Rencana alokasi anggaran hasil penghematan subsidi BBM untuk percepatan pembangunan infrastruktur energy dan infrastruktur transportasi public yang nyaman bagi masyarakat. (as) Foto : tim parle

DPR RI Dukung Peningkatan Kerjasama Turki-Indonesia

DPR RI mendukung peningkatan hubungan yang erat antar kedua negara Indonesia-Turki dalam berbagai bidang.



Ketua DPR RI dan juga Presiden PUIC Marzuki Alie saat menerima Ketua Parlemen Turki Cemil Çiçek

Demikian pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie saat menerima Ketua Parlemen Turki Cemil Çiçek disela-sela sidang organisasi kerjasama negara Islam/OKI (PUIC), di Palembang, Minggu, (29/1).

“Untuk meningkatkan hubungan antar parlemen kami telah mempunyai Grup Kerjasama Antar Parlemen (GKSB) berjumlah 59 group diantaranya group Indonesia-Turki, Tugasnya bertujuan meningkatkan hubungan yang erat antar kedua negara khususnya dengan negara Turki yang merupakan anggota penting di forum PUIC,”papar Presiden PUIC ini.

Menurut Marzuki, dirinya berharap kehadiran Turki dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan

hubungan antar anggota parlemen di PUIC. “Kami mengucapkan terima kasih kepada ketua Parlemen Turki. pada sidang umum di Kampala, Turki telah memberikan dukungan kepada Indonesia,”paparnya.

Sebelumnya terdapat 3 Presiden PUIC diantaranya Indonesia, Iran dan Turki. namun Kemudian, Turki mendingurkan diri lalu mengalihkan dukungannya kepada Indonesia. “Hubungan dengan turki saat ini semakin baik khususnya pada berbagai bidang termasuk investasi, sejak kunjungan Indonesia ke Turki dan kunjungan balasan termasuk para pengusaha arus investasi semakin deras, karena itu perlu ditingkatkan saling kunjung antar kedua negara,”katanya.

Menurutnya, melalui saling kunjung ini kita mengharapkan hubungan kedua negara semakin meningkat tidak hanya parlemen tapi juga rakyat turki. “Kita tahu Turki telah banyak membantu dalam bidang pendidikan dan kita harapkan dapat semakin meningkatkan kedepannya,”ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Marzuki meminta Turki membantu persoalan finansial terkait adanya sejumlah anggota yang tidak mampu memberikan kontribusi finansial terhadap keberlangsungan organisasi PUIC. “Kita ingin kebersamaan terus dibangun jangan sampai karena tidak membayar kontribusi negara tersebut dikeluarkan dan dicabut haknya sebagai anggota. perlu gotong royong yang dibangun dan mengingatkan kembali negara yang belum membayar kewajibannya apakah kelalaian atau apa,”katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR juga meminta dukungan dari Ketua Parlemen UEA terkait persoalan finansial organisasi PUIC ini, pada kesempatan itu, Marzuki mengajak negara yang memiliki kemampuan finansial untuk memberikan dukungan penuh guna keberlangsungan organisasi itu.

Ketua Parlemen Turki Cemil Çiçek mendukung upaya dari Parlemen Indonesia, dan mengharapkan hubungan kerjasama parlemen ini ditingkatkan dalam berbagai bidang. “Kita mengharapkan kerjasama ini saling menguntungkan antar kedua negara, Turki percaya kedua negara memegang peran kunci dalam berbagai isu global dan memberikan kontribusinya dalam perdamaian dunia.

Menurutnya, Turki juga memiliki tanggung jawab dalam berbagai organisasi tidak hanya PUIC, G8, ataupun G-20. “Perlu adanya tanggung jawab bersama demi terciptanya organisasi yang efektif dan efisien guna mencapai keberlangsungan organisasi tersebut,”paparnya. (si) foto:iw/parle

Ketua DPR Terima Aspirasi Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia

Perwakilan organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyampaikan aspirasi tentang status mereka yang belum mendapat perlindungan hukum sehingga sering menjadi alat politik bagi pejabat di daerah. Kepada Ketua DPR Marzuki Alie, mereka meminta agar undang-undang terkait profesi mereka Perangkat Desa dapat dipertegas.

“Masa jabatan sebagai perangkat desa ini benar-benar menghantui kami, sekarang dibanyak kabupaten di Indonesia sedang berlangsung pemilihan kepala desa bahkan pemilukada. Kondisinya kalau kepala desa atau bupati terpilih tidak suka dengan kita yo wis bubar. Apa bisa desa dibangun dengan kondisi seperti itu,” papar Ubaidi Rosidi Ketua Umum PPDII saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/12).

Ia menyebut sebagai aparat desa juga melaksanakan tugas negara seperti monitoring, pencatatan, pelaksanaan pajak dan trantib akan tetapi sejauh ini belum ada standar gaji setiap bulan bahkan dibberapa kabupaten dibawah standar UMR. “Ada yang 200ribu, 300ribu sebulan. Bahkan ada yang digaji 900ribu rupiah per-tiga bulan,” imbuhnya.

Pada bagian lain Ubaidi yang juga menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan di Desa Kale Kangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jateng menyampaikan harapan untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Bagi kami perangkat desa sudah layak nya bekerja seperti PNS, bukan nilai nominal PNS-nya yang kami cari tapi pengakuan atas profesi kami, sebagai abdi negara,” ulasnya.

Menjawab hal ini Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan sudah beberapa kali mendapat masukan tentang kondisi perangkat desa yang memprihatinkan. “Saya sering turun ke bawah, banyak desa yang tidak disentuh bupati apalagi kalau desa itu pada saat pemilukada bukan penduduknya,” ujarnya. Organisasi perangkat desa yang berada di bawah Sekretaris Desa baginya merupakan ujung tombak yang paling bawah, benteng

terakhir penjaga budaya bangsa.

Ia menjelaskan DPR dalam hal ini Komisi II sedang membahas beberapa RUU yang kemungkinan terkait dengan aparat desa. PPDII patut mengawal seluruh proses yang sedang berlangsung tetapi tidak perlu dengan mengerahkan massa cukup dengan mengirimkan utusan yang memantau dan memberikan masukan secara aktif kepada wakil rakyat yang sedang ber-sidang. “Saya juga akan ber-kirim surat kepada Mendagri agar perangkat desa tidak diganti sesukanya,” lanjutnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi yang turut mendampingi Ketua DPR menjelaskan saat ini sedang membahas RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam undang-undang tersebut akan diatur secara tegas tentang profesi PNS yang tidak dapat dipolitisasi oleh pejabat negara. “Pembina PNS di

daerah bukan lagi bupati tapi pegawai paling senior yaitu sekda. Jadi bupati misalnya tidak bisa lagi memindahkan orang sembarangan,” tandasnya.

Pada bagian lain ia menyebut pengangkatan sekretaris desa hanya dilakukan sekali saja dan tetap, apabila yang bersangkutan memasuki masa pensiun maka penggantinya akan didatangkan dari kecamatan. Tuntutan yang disampaikan perangkat desa menurutnya masuk akal, logis dan dapat dilaksanakan.

“Saya akan melihat peluang aparat perangkat desa akan dikaitkan dengan RUU ASN ini. Jadi supaya aturannya nanti ada cantolan, jadi tidak lepas dan mudah diganggu gugat,” lanjutnya. Ia meminta PPDII menunjuk perwakilan yang benar-benar paham tentang desa untuk dapat mendampingi selama pembahasan RUU tersebut. (iky)



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menemui Perwakilan organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)

Presiden PUIC Pertama Pidato Parlemen Negara Arab Walk Out

Suasana persidangan berubah menjadi hangat ketika Presiden PUIC pertama asal Iran, Ali Akbar Nateq Nouri menyampaikan pidato sebagai rangkaian acara pendahuluan sebelum konferensi dibuka secara resmi. Ia berpidato dengan penuh semangat menggunakan bahasa Persia dihadapan seluruh delegasi di Ballroom Hotel Aryaduta, Palembang, Sumsel, Senin (30/1/12).



Presiden PUIC pertama asal Iran, Ali Akbar Nateq Nouri menyampaikan pidato di Sidang PUIC Ke-7

Ketika pidato sudah berlangsung selama 10 menit, rombongan delegasi dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi tiba-tiba berdiri dan tanpa permisi pada pimpinan sidang Presiden PUIC Marzuki Alie meninggalkan ruangan. Pihak kesekjenan terlihat memberikan isyarat kepada Nouri untuk mempersingkat pidato. Segera setelah pidatonya selesai pimpinan sidang segera mengumumkan pertemuan diskors. “Mohon maaf sidang sementara kami skors,” ujar Marzuki.

Presiden PUIC yang juga Ketua DPR, didampingi Ketua Delegasi Indonesia Hidayat Nurwahid terlihat melakukan pembicaraan dengan rombongan delegasi Arab yang menyatakan keberatan dengan pidato yang disampaikan Ali Akbar Nateq Nouri. Pimpinan

sidang Marzuki Alie kemudian dapat meyakinkan delegasi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk kembali memasuki ruangan sidang.

“Pertama kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian baru berlangsung. Pidato dari Ali Akbar Nateq Nouri dari Iran adalah bagian dari penghormatan kepada pendiri organisasi PUIC. Kami menyadari walaupun sesama Islam ada perbedaan diantara kita. Mari saling menjaga, saling menghormati, berusaha membangun persatuan dan kesatuan dalam membesarkan organisasi,” himbau Presiden PUIC sesaat setelah membuka sidang kembali.

Insiden yang mendapat perhatian penuh wartawan ini terjadi beberapa menit sebelum Presiden Susilo Bam-

bang Yudhoyono memasuki ruangan untuk menyampaikan pidato membuka secara resmi Konferensi ke-7 Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI.

Ali Akbar Nateq Nouri adalah pimpinan parlemen Iran yang termasuk salah seorang pendiri organisasi PUIC pada 17 Juni 1999. Ia kemudian terpilih menjadi Presiden pertama PUIC.

Pidatonya dalam pembukaan Konferensi ke-7 PUIC cukup lugas mengulas beberapa permasalahan di dunia Islam. Ia menyebut banyak negara muslim yang lupa belajar pada masa lalu hingga akhirnya tertinggal dalam persaingan dengan bangsa-bangsa lain terutama Barat.

Pada bagian lain ia juga mengkritisi negara Islam yang belum mampu menghadirkan demokrasi. “Kita juga sudah sangat mengenal kebebasan dan demokrasi. Sekarang ini tidak ada yang bisa menghalangi para pemimpin untuk tidak memahami pesan rakyatnya, mengabaikan berarti mengabaikan kebenaran,” tandasnya.

Ia juga mengecam agresi Amerika Serikat di Afganistan dan Irak yang disebutnya sangat gagal dan telah membunuh ratusan ribu jiwa serta menghamburkan banyak uang. Kekuatan asing itu menurutnya hanya mencari keuntungan sendiri dan melakukannya dibawah payung kebohongan dan penipuan.

Pada bagian lain Ali Akbar juga mengutip beberapa pesan agama yang diduga menyingung keyakinan delegasi Arab. Seperti diketahui bangsa Iran dikenal memiliki pemahaman agama dengan aliran Syiah sementara sebagian besar delegasi Arab beraliran Wahabi. (iky)/foto:iw/parle.

SBY Resmikan Konferensi PUIC

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan konferensi organisasi kerjasama negara islam/OKI (PUIC) di Palembang. didalam pidatonya, SBY mengatakan, dunia ini sedang mengalami perubahan yang sangat cepat dan tidak terduga dibanding yang lalu.



Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan konferensi PUIC Ke-7 di Palembang

“Siapa yang bisa memprediksi transformasi politik yang terjadi di Timur Tengah dan negara Afrika Timur, dan siapa yang dapat memprediksi persoalan ekonomi yang terjadi di Eropa,”kata SBY dihadapan para delegasi peserta konferensi PUIC ke 7 Palembang.

Menurut SBY, isu utama saat ini adalah semakin berlanjutnya krisis keuangan global dan ekonomi yang merembet keberbagai negara. Meskipun pengaruh berdampak di Eropa pada saat ini, namun realitasnya krisis tersebut juga berdampak kepada kita semua. “kita mengkhawatirkan krisis ini semakin memburuk dan berdampak global, bahkan pertumbuhan menurun sementara yang terbuka dapat menyebabkan resesi yang dalam,”ujarnya saat menyampaikan pidato pembukaan sidang PUIC di Palembang, Senin, (30/1).

Pertumbuhan populasi dunia tahun lalu, jelas SBY, telah mencapai 7 triliun sementara diprediksi 2045, akan mencapai 9 triliun dimana rakyat saling berbagi makanan, energi dan sumber daya berkelanjutan di muka bumi ini.”Ini seperti halnya pemerintah dan masyarakat bertarung merebutkan

sumber daya tersebut untuk keberlangsungan hidupnya,”katanya.

SBY menambahkan, kita harus meningkatkan kerjasama dan integrasi ekonomi diantara negara muslim. “Ini merupakan tantangan PUIC apakah secara langsung dapat dapat memecahkan persoalan melalui kebijakan koordinasi dan hukum,”paparnya. selain itu Presiden RI mendorong terciptanya reformasi keuangan internasional dan proses pengambilan kebijakan di bidang ekonomi, Indonesia juga harus meningkatkan anggaran keuangan untuk pengembangan sektor ekonomi. Di berbagai tempat, kondisi ekonomi yang lemah mendorong terjadinya krisis identitas dan budaya dari suatu negara, “dalam hal ini semakin meningkatnya tanda-tanda Islamophobia.”katanya.

Sejak di dirikan pada tahun 1999, PUIC telah mengalami perkembangan dari jumlah anggota tetapi juga peran dan relevansi gerakan PUIC didalam komunitas internasional dan dunia islam. “PUIC secara efektif telah menyuarakan suara ummah dalam berbagai isu politik, ekonomi maupun sosial. PUIC juga dapat mempererat kerjasama antar kedua negara, Indo-

nesia sa-ngat bangga menjadi penyelenggara konferensi PUIC ke-7 dan bekerja dengan semua saudara dalam berbagai isu yang berkembang saat ini,”ujarnya.

Dunia abad 21, papar SBY, ditandai dengan meningkatnya konektivitas dan keterbukaan. saat ini, mulai terjadi pergeseran kekuasaan, tidak hanya secara horizontal antara negara, tetapi juga vertikal dari pemerintah untuk jaringan-organisasi, perusahaan dan individu. “Kita juga dapat mengantisipasi perubahan yang terus menerus baik politik, ekonomi maupun sosial, karena itu jika perubahan tidak diimbangi dengan reformasi maka dapat terjadi keguncangan dan pergolakan,”paparnya.

Saat ini umat muslim kurang lebih terdiri dari 20 persen populasi dunia, namun kurang lebih tujuh persen output umat muslim. “Negara-negara Muslim menghasilkan kurang dari tujuh persen dari output perdagangan dunia, dan kurang dari sepuluh persen dari ekspor barang dagangan dunia, sementara dari 50 negara maju yang paling banyak berhutang terdapat 22 adalah negara-negara muslim.(si) foto:ig/parle

Konferensi ke-7 PUIC Usai, Terima Kasih Untuk Wajah yang Selalu Tersenyum

Rangkaian panjang persidangan Konferensi ke-7 Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI, 24-31 Januari di Palembang, Sumsel telah usai.

Kegiatan kali ini terbilang fenomenal karena untuk pertama kalinya dihadiri oleh 15 Ketua dan 3 Wakil Ketua Parlemen. Beragam komentar disampaikan delegasi yang datang dari 37 negara serta 8 observer sesaat sebelum konferensi ditutup secara resmi oleh Presiden PUIC, Marzuki Ali.

“Atas nama parlemen dari kelompok negara-negara di Asia kami mengucapkan terima kasih pada tuan rumah Indonesia atas penyelenggaraan konferensi yang begitu baik dan keramah-tamahan yang begitu hangat. Terima kasih pula atas sambutan dan wajah-wajah yang selalu tersenyum rakyat Indonesia,” kata Ketua delegasi Turki, Emirullah Isler yang berbicara mewakili kelompok negara-negara Asia saat penutupan Konferensi ke-7 PUIC di Ballroom Hotel Aryaduta, Palembang, Sumsel, Selasa (31/1/12).

Ia mengaku sangat menikmati rangkaian pertemuan dan bagaimana semua delegasi saling bertukar fikiran dengan cara yang begitu memuaskan.

PUIC menurutnya akan menjadi organisasi besar yang berperan dalam meningkatkan kualitas parlemen di negara-negara anggota OKI.

Sementara itu Muhammad Al Qudaifi mewakili negara-negara Arab mengingatkan tugas besar organisasi yang belum tuntas yaitu merintis jalan menuju kesejahteraan rakyat di negara-negara anggota OKI. Disamping itu ia menekankan tugas penting PUIC untuk berperan aktif dalam upaya membebaskan Yerusalem dari cengkaman Israel.

Ketua delegasi Sudan Gottbi El Mahadi mengajak parlemen negara-negara anggota OKI memberikan perhatian pada legislasi dan supremasi hukum yang merupakan faktor penting untuk memperkuat ikatan diantara umat Islam diberbagai negara dan juga untuk memperkuat kerjasama antar negara.

Secara khusus ia menyampaikan apresiasi kepada tuan rumah Indonesia yang disebutnya sebagai negara yang luar biasa. “Terima kasih pada

tuan rumah yang sudah melaksanakan pertemuan ini. Kami sangat menghargai keramah-tamahan dan kemurahan hati yang telah kami terima semenjak kami tiba di negara luar biasa ini,” demikian Mahadi.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso juga berpidato memaparkan proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia. “Penduduk kami lebih dari 240 juta jiwa, mayoritas muslim yang tersebar diribuan pulau dengan ratusan etnis, berbagai suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Kami bisa mempraktekkan sistem demokrasi yang hebat dan maju. Lebih maju dari praktek demokrasi di benua Amerika dan Eropa sekalipun,” tandasnya disambut tepuk tangan hadirin.

Ia mengaku percaya PUIC akan berkontribusi besar dalam perkembangan kondisi ummah dan masyarakat global dimasa-masa yang disebutnya penuh tantangan. Ia berharap Konferensi ke-7 ini menjadi kesempatan untuk menguatkan kembali momentum konsolidasi dan solidaritas diantara negara anggota agar dapat menghasilkan solusi konkrit bagi perbaikan masalah ummah dan dunia. (iky)



Para Delegasi Negara Anggota PUIC sebagai peserta Konferensi ke-7 PUIC di Palembang berpose bersama-sama

Proses Demokrasi Indonesia disanjung UEA

Ketua Parlemen Uni Emirat Arab Muhamad Ahmad Almour menyanjung proses demokrasi di Indonesia. Selain sebagai negara muslim terbesar, Indonesia juga telah tampil sebagai negara yang mampu mematahkan stigma bahwa Islam tidak mampu menjalankan demokrasi.

“Indonesia merupakan negara Islam terbesar, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, bahkan terbukti parlemen Indonesia sangat kondusif berdemokrasi, dan ini mematahkan stigma bahwa Islam tidak dapat berdemokrasi dengan baik,” kata Muhamad saat diterima Ketua DPR Marzuki Alie, di Palembang, Sabtu, (28/1).

Menurut Muhamad, Masyarakat Indonesia ramah tamah, santun dan semoga dengan keikutsertaan Indonesia kita semua mengharapkan aspirasi bangsa muslim dapat terwakili. “Kita mengharapkan dengan adanya OKI maka kerjasama antar bangsa dapat semakin baik,” jelasnya.

Dia mengatakan, problem di negara Islam diantaranya persoalan sektarian dan persoalan regional. Keduanya itu merupakan penyebab perpecahan umat muslim di seluruh dunia. “Mari kita tampilkan Islam yang bersatu, dan menjaga satu sama lain sehingga diharapkan dapat mencegah perpecahan umat Islam,” katanya.

Muhamad mengharapkan, konferensi ke-7 parlemen negara organisasi kerjasama Islam/OKI (PUIC) dapat menampilkan umat Islam yang cinta damai, dan bersatu. Memang dengan adanya terorisme semacam Al-Qaeda membuat wajah Islam tercoreng dan menimbulkan kesan radikal terorisme. “Mari kita tampilkan Islam yang cinta damai dan baik khususnya Indonesia,” paparnya.

Ketua DPR RI Marzuki Alie menuturkan bahwa apa yang disampaikan de-



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menemui Ketua Parlemen Uni Emirat Arab Muhammad Ahmad Almour

legasi parlemen negara-negara Arab itu sebenarnya bukan yang pertama kalinya. “Indonesia sudah terkenal ramah, santun dan menghormati tamunya. Ketua Parlemen UEA sangat menghargai hal itu,” ujarnya.

Negara-negara Arab menginginkan agar stigma Islam yang berdampingan dengan terorisme itu bisa dihilangkan lewat hubungan baik Indonesia dengan Eropa dan Amerika. “Mereka menilai kita bisa jadi agen karena punya hubungan baik dan dihargai AS dan Eropa,” katanya.

Menurutnya, Indonesia bisa menunjukkan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. “Islam itu bukan teroris, tetapi selama ini kekerasan hanya dilakukan oleh kelompok kecil ekstrim yang tidak mewakili

Islam. Potensi positif bangsa Indonesia itu seharusnya juga dijadikan modal untuk menarik investasi atau mempromosikan pariwisata,” ujarnya.

Dia menambahkan, setiap kunjungan ke Timur Tengah, dirinya selalu mengajak mereka berinvestasi. Tapi mereka tidak menoleh ke Indonesia. Kalau Malaysia sudah dan kita tertinggal. “Makanya setiap ada kesempatan saya selalu berkampanye agar mereka bisa tertarik berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.

Kalangan dunia usaha di kawasan Timur Tengah juga sudah menyadari bahwa sudah saatnya mereka mulai beralih investasi ke arah Timur karena dimasa lalu, seberapa pun besar uang mereka investasikan di Barat tidak bisa terjamin (si)/foto:iw/parle.



KONFERENSI PUIC Ke-7



7TH SESSION OF THE PARLIAMENTARY UNION OF THE OIC MEMBER STATES (PUIC) CONFERENCE

Palembang - Indonesia, 24-31 January 2012



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id